



Buletin

Parlementaria

Nomor 964/III/VI/2017 • Juni 2017



**Ketua DPR RI Safari Ramadhan
ke Provinsi Riau**

**Badan POM Sumbar Harus
Perketat Pengawasan**

**Buka Puasa Bersama
Ketua DPR RI
Motivasi 1000
Anak Yatim**

TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN



Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi Wakil Ketua BURT DPR Roem Kono dan Sekjen DPR Achmad Djuned berbincang dengan Anak-anak yatim di Masjid Baiturrahman DPR

Buka Puasa Bersama, Ketua DPR RI Motivasi 1000 Anak Yatim

Pimpinan DPR RI kembali menggelar buka puasa bersama 1000 anak yatim dari berbagai yayasan yang ada di Jabodetabek pada Ramadhan tahun ini di aula Masjid Baiturrahman, Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (09/06).

Dalam kesempatan tersebut, tampak Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Ketua BURT Roem Kono, Sekjen DPR Achmad Djuned dan pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR, dan Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR.

Novanto, dalam sambutannya, mengatakan tujuan berpuasa untuk bertaqwa kepada Allah. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi momentum untuk lebih peduli terhadap sesama yang mengalami kekurangan.

Politisi dari F-Golkar ini juga memberikan motivasi kepada anak-anak yang hadir agar tekun belajar dan berdoa. "Bapak mengajak anak-anakku agar rajin

belajar supaya dapat menggapai cita-cita, karena orang sukses adalah orang yang rajin dan berakhlak," tutur Novanto.

Dia juga menceritakan perjalanan hidupnya sebelum menjadi Ketua DPR, ia pernah hidup susah bahkan menjadi supir. Tetapi, berkat kerja keras dan doa, ia bisa menjadi pimpinan DPR seperti sekarang.

"Jadi kita tidak boleh putus asa dan malas, karena orang sukses berasal dari berakhlak mulia. Semoga adek-adek kalau besar bisa jadi pemimpin negara," kata Novanto.

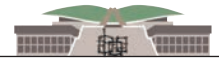
Sekjen DPR Achmad Djuned mengatakan, momen buka bersama ini merupakan acara tahunan pimpinan DPR. Menurutnya, kegiatan sosial seperti ini merupakan kebahagiaan tersendiri.

Ia juga mengharapkan, dengan semangat dan motivasi yang diberikan kepada anak yatim, setidaknya akan menumbuhkan rasa kepercayaan di dalam diri mereka. Bahwa mereka adalah anak bangsa yang juga berpotensi untuk berprestasi.

"Tadi disampaikan mudah-mudahan dari 1000 ini ada yang menjadi kepala daerah, anggota DPR dan Menteri. Dengan dimotivasi seperti itu, saya yakin akan membawa dampak positif kepada mereka agar rajin belajar," ungkapnya.

Usai buka puasa bersama, acara dilanjutkan dengan Shalat Magrib berjamaah dan pemberian santunan oleh PIA dan Pejabat Setjen DPR. ■

(am/sc). Foto: jaksa/hr



Pimpinan DPR RI bersama tiga Anggota DKPP terpilih

DPR RI Sahkan tiga Anggota DKPP

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Kamis (08/06/2017) selain mengesahkan 9 orang komisioner KPAI, juga mengesahkan 3 anggota Dewan Pengawas Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) yang sudah menjalankan *fit and proper test* di Komisi II DPR.

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menyampaikan laporan hasil *fit and proper test* calon anggota DKPP. "Pada 22 Mei kami (Komisi II) telah melakukan rapat intern membahas tatib dan mekanisme calon anggota DKPP. Rapat memutuskan 3 anggota DKPP," jelas Lukman di Ruang Rapat Paripurna, Nusantara II, DPR, Senayan, Jakarta.

Usai menyampaikan laporan, Fadli menanyakan kepada peserta rapat. "Apakah calon DKPP yang baru saja disampaikan saudara Lukman Edy dapat disetujui," katanya seraya bertanya pada peserta rapat paripurna.

Setelah disepakati, para anggota DKPP terpilih yaitu Prof. Dr. Muhammad, SIP, Prof. Dr. Teguh Prasetyo, MSi dan Alfitra Salam dipersilahkan maju ke depan untuk diberikan ucapan salam serta melakukan foto bersama. ■

(ria.mp) Foto: Jaka/hr

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH
Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Sekjen DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Mastur Prantono, Suciati, S.Sos

SEKRETARIS REDAKSI
Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra
Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega

REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER
Rizka Arinindy, Supardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief
Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI FOTO
Bagus Mudjiharjanto

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurahman, Abdul Kahfi S. Kom

DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Pesta Evaria Simbolon, S.E, M.Si (Kasubag Distribusi)

ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Mujiono

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Remon, Yuliana Puspita,
Ifan, Siti Rondiyah, Oji Saputra
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

Pada Event Wisata Nasional Baka
Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir
tanggal. 11 Juni 2017



Ketua DPR RI Safari Ramadhan ke Provinsi Riau

Ketua DPR RI Setya Novanto menerima penyambutan dari tokoh adat Bagansiapiapi, Riau



Ketua DPR RI Setya Novanto melakukan Kunjungan Kerja dan Safari Ramadhan ke Provinsi Riau, Minggu (11/6) pagi. Agenda pertama diawali kegiatan Novanto di kota Dumai.

Kunjungan kerja dan Safari Ramadhan ini, dilakukan Novanto bersama Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Roem Kono dan Ketua Fraksi Golkar DPR RI Bapak Robert Kardinal, didampingi Gubernur Provinsi Riau Arsyadjuliandi Rachman, Walikota Dumai Zulkifli AS, Bupati Polelawan M. Harris, Bupati Rokan Hulu Suparman, serta pejabat teras lainnya.

"Kami mengunjungi Pelabuhan Kargo Pelindo Dumai, menyaksikan bongkar muat kontainer dan aktivitas pelabuhan lainnya. Padatnya aktivitas pelabuhan menandakan perekonomian yang bergerak pesat," ungkap Novanto.

Selanjutnya, ia mengunjungi Pelabuhan Penumpang Internasional Kota Dumai, menyapa para penumpang yang akan berangkat ke Malaka, Batam, serta ke berbagai daerah lain. Sekaligus mengecek persiapan pelabuhan menyambut mudik Idul Fitri.

Setelah berkunjung langsung dan berdialog dengan para penumpang yang hendak menyeberang ke berbagai daerah, Novanto mengatakan bisa mengetahui sejauh ini aktivitas di Pelabuhan Kargo Pelindo Dumai dan Pelabuhan Penumpang berjalan dengan baik.

Posko pengamanan angkutan lebaran di pelabuhan yang melibatkan petugas gabungan dari kepolisian, militer, maupun dinas perhubungan, dan pihak lainnya, diharapkan bisa menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

"Saya mengajak semua warga Riau, maupun masyarakat Indonesia pada umumnya, agar mendukung dan melaksanakan sistem pelayanan serta pengamanan angkutan lebaran sejak saat ini, serta pro aktif menjaga keamanan dan ketertiban," kata Novanto.

Ketua Umum Golkar ini juga meminta pihak kepolisian dan semua pihak untuk mendeteksi sejak dini dan mencari solusi pencegahan serta penanganan terhadap berbagai ancaman atau potensi gangguan yang bisa menyebabkan hambatan pelayanan atau keamanan masyarakat. ■

(Jaymp), Foto: Jayadifhr



Ketua DPR RI Setya Novanto berdialog dengan penumpang kapal di Pelabuhan Kargo Pelindo Dumai

Pimpinan DPR Terima LHP Investigatif Pelindo II

Ketua DPR RI Setya Novanto menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) investigatif BPK RI atas perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT Jakarta International Container Terminal (JICT) antara PT Pelindo II dengan *Hutchison Port Holding* (HPH). Laporan hasil investigasi ini diserahkan langsung Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2017).

Dalam laporannya, BPK menyimpulkan adanya indikasi berbagai penyimpangan dalam proses perpanjangan kontrak JICT. BPK menafsir kerugian negara akibat penyimpangan tersebut berkisar Rp 4,08 triliun dari kekurangan *upfront fee* yang seharusnya diterima PT Pelindo II.

“Penyimpangan tersebut terkait dengan inisiasi rencana perpanjangan perjanjian kerjasama tanpa persetujuan RUPS, penunjukkan HPH tanpa mekanisme pemilihan seharusnya, dan penunjukkan *financial advisor* dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangan untuk mendukung perpanjangan perjanjian kerja sama dengan HPH,” ungkap Moermahadi Soerja.

Menanggapi hal tersebut, Setya Novanto menyerahkan hasil audit

tersebut langsung kepada Ketua Pansus Angket Pelindo II Rieke Diah Pitaloka untuk segera ditindaklanjuti. “Bagi DPR dan BPK penyelesaian penanganan kasus Pelindo II terutama perpanjangan kontrak JICT merupakan bukti nyata komitmen penegakkan hukum agar terwujud transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara,” tandasnya.

Sementara itu, Rieke mengatakan hasil audit investigasi BPK merupakan dukungan terhadap pansus untuk menepis anggapan yang terkesan mengada-ngada dan politis. Menurut Rieke, dengan diterimanya LHP ini, pansus akan menyerahkan hasil pansus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera diproses ke tahap penyidikan.

“Namun demikian, ini audit investigatif tahap pertama. Audit investigatif berikutnya proyek kalibrasi dan *global bond* yang

bunganya harus dibayar negara Rp 1,2 triliun/tahun tanpa proyek yang berjalan dengan baik,” jelas politisi dari F-PDI Perjuangan ini.

Penyampaian LHP investigatif ini didasarkan pada permintaan pansus yang menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan yang terindikasi melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar. Berdasarkan hitungan pansus sendiri (*future value*), untuk perpanjangan kontrak JICT saja, negara berpotensi kehilangan Rp 17,9 triliun.

Hal tersebut disebabkan karena belum terjadi komposisi saham yang sah. Diketahui, komposisi saham yang dimiliki oleh negara hanya 49 persen. Padahal, untuk penanaman modal asing, negara setidaknya memiliki saham 51 persen.

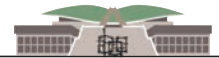
“Sepengetahuan kami, Indonesia masih 49 persen belum 51 persen. Dengan hitungan 49 persen ini, maka kerugian sampai dengan 2039 adalah sekitar Rp 17 triliun. Sementara, yang dihitung BPK adalah kerugian di masa sekarang akibat berbagai proses yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Saya kira Rp 4,08 triliun bukan angka yang sedikit dan pansus akan terus mengejar persoalan lainnya,” tutup Rieke.

Sebagaimana diketahui, kontrak JICT diperpanjang sebelum memasuki tenggat waktu, yang harusnya berakhir pada tahun 2019 namun kontrak sudah diperpanjang pada tahun 2015 tanpa proses administratif. ■

(annisc) Foto: Jayadifhr



Suasana pertemuan Pimpinan DPR dengan BPK perihal LHP Investigatif Pelindo II



Baleg DPR RI Dukung Kedaulatan Musik Indonesia

Industri musik tanah air belakangan dinilai lesu, dengan regulasi undang-undang permusikan yang digagas oleh insan musik lokal diharap bisa memajukan seni musik Indonesia. Dengan adanya aturan tentang permusikan, negara dituntut hadir untuk mengurus bidang musik seperti penyiapan pendidikan, pelestarian dan pemajuan semua genre musik, baik yang modern, tradisonal maupun etnik yang dimiliki oleh daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Perhatian yang serius ditunjukkan Badan Legislasi (Baleg) DPR ketika menerima audiensi sejumlah pelaku musik nasional yang tergabung dalam Kami Musik Indonesi (KMI) di ruang rapat Baleg Nusantara I Rabu (7/6/2017).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto ini menghasilkan catatan penting bahwa Baleg mendukung penuh kedaulatan musik Indonesia. "Kita semua sudah mendengar tadi bahwa seluruh fraksi-fraksi bisa memahami dan menindaklanjuti dari usulan RUU Permusikan Indonesia," ujar Totok.

Bahkan Pimpinan Rapat mencatat 10 fraksi yang ada di DPR bersedia memberikan dukungan terdepan untuk kemajuan musik Indonesia. "Saya sulit untuk mencari nomor urut dua semua nomor urut satu. Jadi saya mencatat Golkar nomor urut satu, PDI P nomor urut satu, PAN nomor urut satu dan seterusnya nomor urut satu. Ini luar biasa artinya ini dukungan sepenuhnya diberikan," paparnya.

Anggota DPR RI yang juga musisi, Anang Hermansyah berpendapat, untuk menegaskan kedaulatan musik Indonesia, pemerintah harus bisa memberantas pembajakan musik. "Kesejahteraan serta perlindungan musisi dan para pelaku di bidang musik tentu harus juga dipikirkan. Di situlah perlu diatur melalui sebuah regulasi," ungkapnya.

Anang juga menegaskan dengan adanya UU Permusikan dimaksudkan sebagai upaya mempercepat agar musik di tanah air berkembang dengan



Pimpinan Baleg DPR menerima audiensi sejumlah pelaku musik nasional

pesat dan memiliki efek konkret bagi pertumbuhan ekonomi kreatif yang disumbang dari sektor musik.

"UU Permusikan diharapkan dapat mempercepat akselerasi sektor musik di tanah air. UU ini menjawab kegelisahan para pelaku di sektor musik yang memang mengalami stagnasi dengan berbagai masalah yang muncul. Saya percaya, regulasi adalah salah satu alat untuk melakukan perubahan sosial dalam hal ini di bidang musik, *law as a tool of social engineering*," tandas Anang.

Juru bicara KMI Glenn Fredly mengatakan KMI mempunyai potensi besar agar industri musik dapat dikelola dengan baik. Selama ini, musik tidak mempunyai tata kelola yang baik. Oleh karena itu, KMI ingin musik Indonesia

berdaulat dalam memajukan industri. Menurut Glenn, insan musik bukan hanya penyanyi, tetapi juga pihak-pihak lain yang terlibat di permusikan. "Kita ingin memajukan musik Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia dan ini selaras dengan UU Pemajuan Kebudayaan," kata Glenn.

KMI juga telah menyerahkan naskah akademik sementara RUU Permusikan kepada Baleg DPR. Menanggapi hal tersebut Totok mengatakan, RUU ini akan menjadi usul inisiatif DPR. "Akan menjadi inisiatif anggota DPR, kemudian dilakukan perubahan di Prolegnas, lalu kita bahas di DPR. Targetnya pada tahun 2018 undang-undang musik ini sudah bisa dilahirkan," jelas Totok. ■

(eko.mp). Foto: Rumi/hr

Persetujuan Tata Ruang Provinsi Untuk Percepat Pembangunan Daerah



Tim Panja RTRWP Komisi IV DPR mengunjungi Provinsi Bangka Belitung

Panja RTRWP Komisi IV DPR perlu segera mengambil keputusan persetujuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Belitung untuk mempercepat pembangunan daerah. Hal tersebut dikemukakan Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron usai menggelar pertemuan dengan Bupati Belitung dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Panja RTRWP Ke Provinsi Bangka Belitung, Kamis (8/6/2017).

“Tetapi pada prinsipnya pengambilan keputusan bisa dilakukan secara parsial, untuk memberikan percepatan pembangunan di Kabupaten, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan tentu juga memberikan kepastian kepada para pelaku usaha,” ungkap Herman.

Politisi Demokrat ini menambahkan, pengambilan keputusan tersebut juga merujuk kepada apa yang dibahas di tingkat provinsi antara DPRD dengan Gubernur yang sudah disetujui, sudah paripurna. Bahkan di Kabupaten sudah disetujui sebagai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

“Kami akan menyampaikan hasil

kunjungan dan verifikasi pendalaman informasi di Kabupaten Belitung ini di dalam Rapat Panja RTRWP nanti, untuk ditentukan sikap seluruh fraksi-fraksi apakah kita akan segera menyetujuinya atau kita tetap akan mendalami sampai betul-betul asas pruden atas kehati-hatian ini kita kedepankan,” tambah Herman.

Legislator Dapil Jawa Barat VIII ini menjelaskan bahwa Kementerian Kehutanan atas rekomendasi dan kajian Tim Terpadu sudah menyetujui, surat yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan juga sudah sesuai seluruhnya dengan apa yang diusulkan oleh Tim Terpadu. Namun ada beberapa spot (wilayah) yang masih menjadi

kepentingan perusahaan yang belum free, clean and clear menurut pandangan Tim Panja RTRWP Komisi IV DPR.

“Sehingga atas asas kehati-hatian, kami kemudian terus mendalami dan mendiskusikannya, bahkan di awal-awal tahun 2012 kami masih ingat, apa yang diajukan Tim Terpadu yang dibiayai oleh Provinsi itu masih mendapatkan resistensi dari para Bupati, sehingga pada waktu itu kita padu-serasikan di periode yang lalu,” terang Herman Khaeron.

Lalu tahun 2015 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersurat kembali untuk meminta persetujuan atas sekitar 5.000Ha kawasan yang masuk dalam DPCLS (Dampak Penting Cakupan Luas dan Strategis) supaya menjadi APL (Area Penggunaan Lain) di dalam revisi tata ruang wilayah provinsi Bangka Belitung.

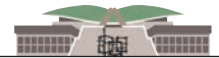
Herman Khaeron juga mengingatkan, segala persoalan hukum di kemudian hari menjadi resiko dari provinsi atau kabupaten yang bersangkutan karena setelah disetujui Komisi IV DPR sudah tidak ikut dalam menentukan peruntukan kawasan-kawasan lainnya yang nanti akan diatur oleh eksekutif (pemerintah daerah).

“Bagi DPR memandangnya secara makro sehingga tanggung jawab untuk memutuskan DPCLS betul-betul berasaskan kepada asas lingkungan, asas keberlanjutan dan tentu asas kehati-hatian,” pungkas Herman.

Bupati Belitung Sahani Saleh dalam kesempatan tersebut berharap apa yang diinginkan Pemda Belitung dan masyarakat untuk membebaskan wilayah dari kawasan hutan lindung segera terealisasi karena jauh sebelumnya sudah didiami oleh penduduk di sana.

“Wilayah yang masih berkaitan dengan tambang, perkebunan misalnya kita tidak mengurus dulu, karena ini betul-betul yang kita perjuangkan kawasan yang sudah ditempati penduduk sejak Indonesia belum merdeka mereka sudah bermukim di sana. Kami mengajak Komisi IV untuk melihat riil adanya situasi di lapangan,” tutup Sahani meyakinkan. ■

(o/le.mp) foto: Naekuraji/hr.



RRI Didorong Bersaing dengan Radio Swasta

Anggota Komisi I DPR Martin Hutabarat mendorong agar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) untuk dapat bersaing dengan radio-radio swasta. Apalagi, dengan adanya dukungan anggaran dari negara, serta klaim Direksi LPP TVRI yang mengatakan jaringan siaran RRI telah menjangkau 85 persen masyarakat Indonesia.

“Kami minta RRI berbenah diri, karena persaingan dengan radio swasta semakin sengit. RRI ini kan milik rakyat, dan anggarannya hampir semua dibiayai oleh negara. Sebelum ada radio swasta, RRI sudah hadir menyuarakan berita-berita kepada masyarakat,” kata Martin, saat RDP dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2017).

Politisi F-Gerindra itu menambahkan, dengan adanya pengalaman yang cukup panjang, serta jaminan anggaran dari negara, seharusnya RRI mampu bersaing. Menurutnya, kunci utama agar RRI diminati oleh pendengar adalah memperbaiki kualitas isi siaran. Ini menjadi tugas Dewas dan Direksi RRI.

“Direksi RRI menjelaskan bahwa 85 persen populasi masyarakat itu sudah tercover jangkauan siaran RRI. Namun dari angka itu berapa yang mendengar siaran RRI? RRI harus membuat survey, berapa persen yang mendengarkan RRI. Jangan-jangan dibawah 10 persen. Kalau kualitas siaran tidak diperbaiki, maka akan sulit menarik pendengar,” tegas Martin.

Sehingga menurut Martin, perlu dipertimbangkan secara matang terkait permintaan Direksi RRI untuk menambah jumlah pemancar, maka akan sia-sia jika tidak diimbangi dengan perbaikan kualitas siaran.

“Kita akan dukung RRI untuk tingkatkan kualitas siaran. Tidak perlu pembangunan infrastruktur yang besar, tapi kualitas siaran yang harus ditingkatkan. Sehingga kalau mau menambah pemancar, harus dipertimbangkan,” imbuh politisi asal dapil Sumatera Utara itu. ■



Anggota Komisi I DPR Martin Hutabarat

Komisi II Setujui PKPU tentang Pemutahiran Data dengan Catatan

Komisi II DPR menyetujui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pemutahiran Data dengan catatan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy saat memimpin rapat konsultasi dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kita menyetujui PKPU tentang Pemutahiran Data, namun ada beberapa catatan yang kita (komisi II) berikan terkait PKPU Pemutahiran Data ini,” jelas Lukman Edy, di Gedung Nusantara II, DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (07/06).

Salah satu catatan yang mengemuka dalam rapat, yaitu mengenai perlunya dibuat peraturan yang memuat norma pendaftaran pemilih apabila KTP elektronik (e-KTP) sudah seratus persen diselesaikan pemerintah. “Kita minta kepada KPU untuk memuat norma tentang e-KTP sebab disampaikan pemerintah tahun 2018 e-KTP sudah diselesaikan seratus persen,” ungkapnya.

Sebab, lanjut politisi F-PKB itu dengan penggunaan basis data e-KTP dalam menyusun daftar pemilih, hal itu bisa meningkatkan efisiensi dalam penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU. “Begitu pemerintah menyelesaikan seratus persen e-KTP, proses pemutahiran data bisa dibuat sederhana. Nama peraturan dan cara kita serahkan kepada KPU, yang penting kita berharap adanya penyederhanaan sistem pendaftaran pemilih,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan KPU melakukan kodifikasi peraturan KPU tentang Pemutahiran Data dengan tujuan mempermudah pihak yang mengatur tentang pemutahiran data pemilih.

“Pemutahiran data ini dikodifikasi dari PKPU sebelumnya, yaitu nomor 4 tahun 2015 dan 8 tahun 2016 serta ada beberapa hal penting yang ditambahkan untuk meningkatkan kualitas data pemilih kita,” jelasnya. ■



Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy

(ria.mp), Foto: Jayadi/hr



Tim Kunspek Komisi IX DPR melakukan pengawasan peredaran obat dan makanan, menjelang Idul Fitri di Balikpapan

Peredaran Obat dan Makanan Jelang Idul Fitri di Kaltim, Aman Konsumsi

Komisi IX DPR RI ingin memastikan pelayanan yang diberikan pemerintah terkait pengawasan peredaran obat dan makanan pada bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri Tahun 1438 H. Pelayanan ini harus optimal sebagaimana yang diinginkan berbagai pihak.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan Komisi bidang kesehatan ini yang bermitra dengan BPOM, merasa peting untuk memastikan lembaga ini beserta seluruh strukturnya di Indonesia melakukan tugas dan fungsinya.

“Memastikan seluruh produk makanan dan obat bahkan kosmetik yang diedarkan dan dikonsumsi masyarakat adalah aman,” paparnya, saat melakukan Kunjungan Spesifik ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dalam rangka pengawasan peredaran obat dan makanan pada bulan Ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri tahun 1438 H, di Balikpapan, Kaltim,

Jum’at (09/06/2017).

Politisi Partai Amanat Nasional ini menjelaskan, pada tahun 2017 masih banyak pelanggaran dengan tidak memenuhi persyaratan ijin edar atau tanpa ijin edar, bisa saja produknya aman tapi tidak memiliki kepastian keamanannya. “Tanpa Ijin edar berarti ini melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia,” katanya.

Komisi IX memberikan aspirasi kepada BPOM RI yang selama ini telah melaksanakan tugasnya dengan baik, melakukan operasi penertiban bersama dengan pihak terkait.

Asisten I bidang Pemerintahan Provinsi Kaltim Meliana menjelaskan

penanganan obat dan makanan perlu dilakukan dengan pendekatan lintas sektoral dan komprehensif yang terintegrasi dan sinkronisasi yang efektif melalui perencanaan yang matang.

Terkait obat dan makanan dengan gizi yang seimbang, Pemerintah perlu menjamin penyediaan obat dan makanan yang aman bagi masyarakat yang terhindar dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan. Dijelaskan pula, peredaran obat dan makanan perlu diawasi dengan benar, karena tidak jarang ditemukan obat dan makanan yang kadaluarsa atau yang disebabkan kontaminasi kuman penyakit, bahan kimia, serta bahan beracun, tetapi masih dijual bebas di pasaran.

“Untuk itu perlu dilakukan operasi penertiban dan masyarakat perlu diberikan perlindungan terhadap bahan pangan dan obat yang dikonsumsi,” ujarnya.

Meliana menambahkan, tantangan ke depan, akan semakin banyak dan perlu diantisipasi, diantaranya modus obat dan makanan ilegal. “Masih menjadi isu sentral makanan jajanan anak sekolah, juga masih menjadi perhatian disamping pengawasan yang lebih ekstra,” paparnya. ■

(as.mpi), foto : agung s/nr.

Badan POM Sumbar Harus Perketat Pengawasan di Titik Rawan

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan, kunjungannya kali ini ke Sumatera Barat adalah untuk melihat kesiapan pemerintah melakukan pengawasan terhadap bahan-bahan makanan dan produk menjelang hari raya Idul Fitri.

“Kami melakukan sidak kepasar Alai di Sumatera Barat, dalam rangka untuk melihat kesiapan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap bahan-bahan makanan yang tidak layak edar. Ternyata di sini masih banyak bahan-bahan makanan yang tidak layak konsumsi,” ujarnya di Padang, Sumbar, baru-baru ini.

Lebih lanjut Dede menilai kota Padang ini posisinya menjadi pintu masuk dari pelabuhan, seperti pelabuhan Belawan, Medan yang berbatasan dengan Sumatera Barat. Di pelabuhan ini banyak masuk barang-barang dari Malaysia yang tidak memiliki izin dari BPOM. Karena itu Badan POM harus memperketat pengawasan di titik rawan seperti ini.

“Makin banyak barang masuk dari negara asing dan tidak memiliki izin edar melalui Badan POM tentu sulit sekali untuk menjaga apakah layak atau tidak layak di konsumsi,” tutur Politisi dari F-Demokrat di sela pertemuan di kantor BPOM Provinsi Sumatera Barat.

Anggota Komisi IX Suir Syam menambahkan bahwa BPOM Provinsi Sumatera Barat sudah sangat aktif dalam melaksanakan pengawasan makanan yang berbahaya di bulan Ramadhan ini. Menurut laporan yang di terima, BPOM Padang sudah melakukan pemantauan sampai ke daerah terpencil seperti daerah Solok Selatan. Hanya saja dia mempertanyakan petani sayur yang menanam sayur yang banyak

menggunakan insektisida.

“Saya mempertanyakan apakah penggunaan insektisida sudah diatur kadar pemakaiannya, jangan sampai melebihi kadar yang ditentukan. Belum lama ini juga BPOM Padang menemukan penjual daging babi di beberapa pasar Kabupaten Kota Provinsi Sumbar,” ujarnya

Dia melihat BPOM Provinsi Sumbar itu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Hanya ada beberapa yang sulit di deteksi yaitu barang-barang makanan maupun kosmetik yang melalui penjualannya media sosial.

Ke depannya, harap Suir Syam, agar BPOM Provinsi Sumbar segera membangun kantor yang lebih baik lagi minimal regional-regionalnya terlebih dahulu, sebab kalau hanya satu BPOM DI Padang yang menangani 19 kabupaten kota itu akan sangat kesulitan mengawasinya. ■

(azka, mp), foto : azka/hr



Tim Kunspek Komisi IX DPR memantau bahan makanan dan produk menjelang hari raya di Pasar Alai Sumbar

PP atas UU Jaminan Produk Halal Harus Segera Terwujud

Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI meninjau kesiapan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat dalam proses implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

“UU No. 33 Tahun 2014 diharapkan memberi kepastian hukum dan jaminan halal bagi konsumen khususnya masyarakat Islam sebagai konsumen terbesar,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Achmad selaku Ketua Tim Kunker Spesifik di Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat, Jumat (09/06).

“Sistem jaminan produk halal dibuat untuk menjamin ketersediaan produk halal serta menumbuhkan kesadaran mengenai kepentingan jaminan produk halal,” sambungnya.

Noor mengatakan, UU No. 33 Tahun 2014, mengatur beberapa pokok, antara lain: menjamin kehalalan produk barang/jasa seperti makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai atau dimanfaatkan masyarakat. UU ini mengamanatkan sertifikat halal dikeluarkan BPJPH berdasarkan fatwa halal yang dikeluarkan MUI.

“BJPH bertanggung jawab kepada Menteri Agama dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal, dan dalam melaksanakan wewenangnya bekerjasama dengan lembaga terkait seperti LPH dan MUI,” terang Noor.

Pertemuan kunjungan spesifik Komisi VIII DPR RI ini dihadiri Kakanwil Kemenag Provinsi Sumbar, Muhammadiyah, NU, juga Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), BPPOM Sumbar, APINDO Sumbar, dan Ketua Majelis Dzikir Babusalam Sumbar.

Kanwil Kemenag Prov. Sumbar telah mensosialisasikan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam berbagai kegiatan, antara lain: pembinaan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Sadar Halal ke Sekolah/Halal Goes To School di Kota Padang di SMAN 1 Padang, SMAN 2 Padang, SMAN 3 Padang, SMAN 6 Padang, SMAN 10 Padang, SMA Adabiah Padang, MAN 1 Padang, MAN 2 Padang,

MAN 3 Padang, MAS TI Lubeg Padang.

Hal ini menjadi sorotan perwakilan APINDO Sumbar, Muzakir Aziz yang mempertanyakan kenapa belum ada Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU ini dan menyayangkan sosialisasi yang hanya dilakukan kepada siswa sekolah tapi tidak kepada para pelaku usaha atau masyarakat sebagai objek maupun pelaku yang akan mempergunakan jaminan produk halal ini. Ditambah masukan bahwa diperlukan sertifikasi khusus untuk auditor produk halal, bukan sekedar bersyarat lulusan S1.

Menanggapi hal tersebut, anggota tim kunker dari fraksi PDIP Agus Susanto yang merupakan dewan mewakili Dapil Sumbar II menjelaskan bahwa sosialisasi

kepada pelaku usaha harus dilakukan dan penentuan syarat auditor sudah melalui berbagai pertimbangan

“Berbagai usulan dan aspirasi di Sumbar ini sangat diperlukan untuk proses implementasi UU Jaminan Produk Halal ini dan tentu saja PP turunannya memang harus segera terwujud, sehingga sosialisasi jelas dan peraturan terkait



Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Noor Achmad didampingi pejabat Kanwil Kemenag Provinsi Sumbar

pemenuhan sumber daya manusia nya segera terlaksana,” ujar Agus saat ditemui usai acara. Dia menegaskan bila PP sudah jadi maka implementasi akan jelas seperti aturan pembayaran, pengadaan infrastruktur, SDM serta faktor pendukung lainnya. ■

(ran,mp), foto : rizka/fr.



Wakil Ketua Komisi IX DPR, Syamsul Bachri



Hadapi Mudik, Pemerintah dan Swasta Diminta Berkoordinasi

Anggota Komisi V DPR RI Nurhasan Zaidi, mengatakan hal terpenting untuk menghadapi mudik lebaran adalah bagaimana sinergi dan koordinasi antar kelembagaan yang berwenang harus kuat, detail dan komprehensif jangan parsial.

“Koordinasi antar *stakeholder* harus berorientasi pada tiga hal yakni keamanan, kenyamanan dan keselamatan. Jangan sampai kejadian seperti *Brexit* tahun lalu terulang lagi, hingga masyarakat berkomentar seolah negara tidak hadir di sana dan parahnya antar pihak yang terkait saling menyalahkan,” ungkap Nurhasan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Kepala BMKG, Basarnas, dan juga perwakilan Polantas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (08/06/2017).

Politisi dari F-PKS ini mengapresiasi terobosan yang telah dibuat masing-masing lembaga demi memecahkan masalah ini. Namun, menurut Nurhasan yang utama adalah sinergi antar pihak harus diperkuat, jangan ada yang merasa paling penting.

Dia juga memberikan catatan penting untuk ditindaklanjuti pemerintah

terhadap beberapa hal krusial yang harus segera disikapi, yakni bagaimana mengatasi keinginan masyarakat untuk menggunakan kendaraan roda dua yang cukup riskan bagi keselamatan perjalanan.

Menurutnya, pemerintah harus terus membangun kultur masyarakat agar dapat lebih peduli terhadap kedisiplinan dan keselamatan.

Sebagaimana diketahui, pada mudik tahunan, kecelakaan paling banyak disumbang oleh kendaraan roda dua.

Lebih lanjut, tandas Nurhasan, dibutuhkan ketegasan pemerintah untuk melakukan inspeksi yang ketat terhadap kelayakan moda transportasi massal, sehingga masyarakat beralih



Suasana Rapat Komisi V DPR RI

menggunakan transportasi umum.

Dengan begitu, akan membantu mengurai kemacetan. Selain itu, kesiapan infrastruktur sarana dan prasarana pendukung dan sistem informasi yang cepat dan akurat juga dibutuhkan agar mudah diakses masyarakat. ■

(ann/mp), Foto: kresno/hr.

Komisi IX Temukan Satu Truk Makanan Berbahaya

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, ditemukan bahan baku untuk membuat kerupuk yang ternyata mengandung boraks. “Jadi tadi dilaporkan oleh Badan POM, bahwa produk semacam ini sudah ketahuan dan sudah diteliti mengandung boraks. Bahan ini untuk membuat kerupuk supaya lebih renyah dan lebih tahan lama. Sudah diperintahkan supaya produk berbahaya sebanyak satu truk beredar di Mataram yang sudah mulai ditarik oleh produsennya,” ujar Syamsul Bachri di Pasar Mandalika, Mataram (6/9).

Syamsul berharap selama bulan puasa ini, produk-produk yang tidak memenuhi standar minimum untuk kesehatan itu ditarik oleh Pemda dan tentu dibawah koordinasi dengan Badan POM.

Komisi IX DPR juga minta bekerjasama dengan Kepolisian untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada produsen, dan juga kepada distributor agar menghindari dari menjual atau memproduksi produk-produk yang tidak sehat dan mengandung formalin, boraks dan sebagainya.

“Kita menyarankan disamping melakukan sidak ke pasar-pasar dan pusat-pusat penjualan, juga ada langkah-langkah sosialisasi dalam rangka preventif terhadap produk-produk yang tidak sesuai dengan standar kesehatan,” ujar Syamsul.

Tim Komisi IX berada di Pasar Mandalika Mataram, untuk melihat secara langsung bagaimana bahan-bahan makanan yang beredar di pasar itu sehat atau tidak. “Memang kami mengambil beberapa sample tadi, secara umum bahan-bahan yang beredar disini cukup sehat, seperti tahu, kerupuk, terasi, dan sebagainya. Namun memang ada beberapa temuan yang kami harap itu tidak berlanjut ke depannya,” tutupnya. ■

(eno/mp), foto: kresno/hr.



Bandara Rendani Manokwari Harus Tambah Runway

Tim Kunspek Komisi V DPR meninjau pesawat sriwijaya yang tergelincir di Bandara Udara Rendani Manokwari, Papua Barat

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Watimena melakukan peninjauan atas insiden tergelincirnya pesawat Sriwijaya Air di Bandar Udara Rendani Manokwari, Papua Barat, Jumat (9/6/2017).

Peristiwa yang berlangsung pada tanggal 31 Mei 2017 ini menjadi sorotan Komisi V DPR untuk meninjau langsung bagaimana peristiwa itu bisa terjadi.

"Kami hadir ke sini tidak untuk menyalahkan pihak maskapai atau kementerian perhubungan tapi kami ingin tahu bagaimana peristiwa itu bisa terjadi sehingga bisa kami evaluasi dan ke depannya tidak ada lagi peristiwa seperti ini," kata Michael.

Lebih lanjut politisi Demokrat ini menyatakan, setelah melihat hasil video cctv, sebuah pesawat Boeing B737-300 milik maskapai

penerbangan Sriwijaya Air tergelincir hingga mengalami *ovrun* atau keluar landasan. Diduga mengalami patah as dan saat mendarat karena landasan pacu yang licin sehingga badan pesawat hilang keseimbangan lalu tergelincir sejauh 20 meter dari landasan.

"Masih banyak yang harus dipenuhi untuk bandar udara tingkat Propinsi ini, contohnya bandara ini *runway* nya masih terbatas baru 2000 meter, sementara untuk penerbangan *take off* dan *landing* harusnya 2250-2500 meter," ungkapnya.

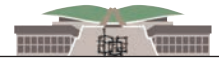
Politisi Dapil Papua Barat ini mengharapkan Bupati Manokwari bisa bekerja keras sehabis lebaran tahun

ini agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban dari sebuah keterbatasan fasilitas yang ada tetapi masyarakat bisa mendapat keamanan dan kenyamanan.

"Direncanakan tahun ini pembebasan lahan untuk penambahan *runway* menjadi tugas dan tanggung jawab Pemda seluas 2.250-2.500 meter. Dengan demikian menjadi bandara ibu kota provinsi yang layak karena hanya di Rendani Manokwari saja yang jarak *runway* nya pendek untuk tingkat propinsi sementara bandara lain sudah cukup," katanya.

Bupati Kabupaten Manokwari Demas P Mandacan mengatakan, yang menjadi kendala saat ini adalah pembebasan lahan karena lahan ini sudah ada bangunannya. Kami harus hati-hati dan sosialisasi dengan baik pada masyarakat agar masyarakat bisa menerima ini," katanya menjelaskan. ■

(chas,mp), foto : chas/hr



Pelaksana Pendidikan di Pusat dan Daerah Harus Sinkronkan Data

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah menekankan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi segala macam data yang berkenaan dengan pendidikan dasar dan menengah.

Hal tersebut disampaikan saat Panitia Kerja Evaluasi Dikdasmen Komisi X DPR RI melakukan rapat evaluasi dengan Kadin Pendidikan dan Dewan Guru di Gedung Guru Provinsi Sulsel. Dia menegaskan pelaksana pendidikan di pusat dan di daerah harus melakukan sinkronisasi data.

“Satu sisi yang perlu dicatat adalah pendataan yang perlu dilakukan. Konfirmasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga apa yang dilakukan pemerintah pusat di daerah Provinsi Sulawesi Selatan hendaknya diketahui,” papar Ferdi, Kamis (8/6/2017) sore.

Kata Ferdi, sebaliknya juga begitu, apa yang dilakukan pemerintah daerah hendaknya ditembuskan dan diinformasikan ke pemerintah pusat. Ini yang menjadi catatan bagi tim kunker, bahwa tingkat koordinasi dan sinkronisasi baik itu data maupun

informasi menjadi titik hal utama dalam dunia pendidikan.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Evaluasi Dikdasmen Komisi X DPR RI ini juga mengimbau kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar melakukan *road show* ulang untuk mencari titik temu komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun dunia pendidikan menengah.

“Koordinasi dan sinkronisasi perlu dioptimalkan. Seperti pengalihan hal baru dari SMA ke SMK menjadi wewenang kabupaten/ kota dialihkan ke dinas provinsi seluruh Indonesia,” ujar Ferdi.

Politisi Golkar ini mengatakan, dalam pendidikan menengah, saat ini Komisi X sedang fokus pada Inpres Nomer 9 tahun 2016, tentang revitalisasi SMK. Realisasi dari inpres tersebut menjadi tidak optimal, manakala komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah tidak optimal. Padahal Komisi X mendukung inpres ini dengan baik.

“Konsekuensi logis adalah mengawasi laporan dari Kemendikbud secara persemester kaitan dengan sukses inpres tersebut,” ujar Ferdi.

Dia juga menyampaikan ,yang menjadi alasan kenapa Sulawesi Selatan dikunjungi Tim Kunker Komisi X karena provinsi ini dianggap sebagai barometer dari pembangunan dunia pendidikan, khususnya di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

“Yang perlu disikapi sangat positif dari kunjungan Panja Komisi X DPR RI Pendidikan Dasar Menengah, yaitu sangat responsipnya Kepala Dinas Pendidikan. Yang kedua peserta perangkat kepentingan seperti guru pengawas dan dewan pendidikan, hal ini menambah keyakinan kami, dalam konteks evaluasi pendidikan dasar, menengah bisa dilakukan lebih cepat untuk melakukan pembaharuan di Provinsi Sulawesi Selatan,” papar Ferdi. ■

(eko.mp).Foto: Eko/hr



Tim Kunspek Komisi IX DPR foto bersama Kadin Pendidikan dan Dewan Guru di gedung Provinsi Sulsel

Perlu Koordinasi dalam Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah

Pasca ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang mulai berlaku tahun 2016, pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah yaitu SMA dan SMK dari kabupaten atau kota ke provinsi, resmi diberlakukan. Pengalihan kewenangan SMA dan SMK ini memerlukan koordinasi yang intensif antara pemerintah kabupaten atau kota dengan pemerintah provinsi.



Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra

Demikian ditekankan Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR ke Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Kamis (8/6/2017). Tim Kunspek disambut langsung oleh Bupati Bojonegoro, Suyoto dan Wakil Bupati Lamongan, Kartika Hidayati. Hadir juga perwakilan DPRD Kabupaten Bojonegoro, serta perwakilan Dinas Pendidikan, baik dari Kota Surabaya, maupun Jatim.

“Dengan adanya pengambilalihan wewenang pendidikan menengah ini, kita mendapat gambaran, bahwa ada permasalahan yang sungguh sangat mendasar, yakni pembiayaan dan tenaga pendidik. Sehingga perlu adanya koordinasi yang intensif,” tegas Sutan, di sela-sela pertemuan.

Terkait pembiayaan, lanjut Sutan, dengan adanya pengalihan kewenangan ini, sebelumnya dengan berlandaskan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, sebenarnya tidak ada kendala berarti. Bahkan banyak kabupaten atau kota yang mampu menyelenggarakan pendidikan menengah secara gratis.

“Menyangkut pembiayaan, sekolah yang selama ini menjadi wewenang kabupaten dan kota bisa digratiskan, karena diambil oleh provinsi, tidak bisa mengambil kebijakan pendidikan menengah gratis. Sehingga menjadi kerepotan,” imbuh Sutan.

Seiring dengan kebijakan pengalihan ini, politisi F-Gerindra itu menilai perlu adanya keeluasaan atau regulasi, sehingga kabupaten atau kota punya kewenangan kembali untuk menganggarkan, terutama terhadap sekolah pendidikan menengah, yakni SMA dan SMK.

Kendala lain yang muncul, diantaranya kabupaten atau kota tidak dapat lagi mengalokasikan dana untuk pendidikan menengah, dan tidak dapat mewujudkan kurikulum muatan lokal yang memperhatikan kekhususan dan keragaman, termasuk masalah tenaga

pendidik.

“Seiring dengan hal itu, catatan-catatan ini kita segera koordinasikan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada rapat kerja pekan depan. Mudah-mudahan catatan ini menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan, dan ada solusi terhadap hal itu,” harap politisi asal dapil Jambi itu.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro Suyoto mengatakan, pengalihan penanggung jawab pengelolaan pendidikan menengah dari kabupaten ke Provinsi, tidak mengubah komitmen Pemkab Bojonegoro terkait pelaksanaan pendidikan warganya, karena sebagian besar yang bersekolah di SMA/SMK/SLB adalah warga Bojonegoro.

“Sebagai bagian Gerakan Ayo Sekolah yang mewajibkan warga Bojonegoro untuk menuntaskan pendidikan menengah atas, bahkan kami canangkan menjadi wajib Belajar 14 tahun,” jelas Suyoto.

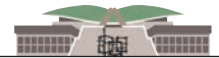
Menurut Suyoto, yang menjadi tantangan dengan adanya kebijakan ini adalah mempertahankan mutu pendidikan dan kejujuran di semua SMA/SMK tersebut membutuhkan usaha dan koordinasi yang tepat. Kemudian, potensi masalah pada pengelolaan yang terkait dengan aset, personil, pengelolaan dana BOS, DAK serta DAU yang harus dapat dimonitor atau dikendalikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui UPT/ Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim di Bojonegoro.

Kunjungan kerja ini diikuti juga oleh Anggota Komisi X DPR, diantaranya, Ridwan Hisjam (F-PG, dapil Jatim), Popong Otje Djundjuran (F-PG, dapil Jabar), Arzeti Bilbina (F-PKB, dapil Jatim), Ledia Hanifa Amaliah (F-PKS, dapil Jabar), dan dari F-PAN hadir Laila Istiana (dapil Jateng) dan Anang Hermansyah (dapil Jatim). ■

(sf,mp) foto: sofyen/hr

Pembangunan Pusdiklat DPR untuk Penguatan Lembaga

Setelah meninjau Balai Pelatihan Kesehatan milik Kementerian Kesehatan RI di Batam, Kepulauan Riau, Tim BURT DPR RI Kamis (8/6) melakukan studi banding ke Balai Diklat BPK RI di Medan, Sumatera Utara.



Sa ma halnya dengan studi banding ke Bapelkes Batam, studi banding ke Balai Diklat BPK ini juga terkait rencana DPR membangun Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Sekretariat



Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso

Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. "Banyak yang kami serap di sini, gedungnya, sarana prasaranya. Kita banyak menggali ilmu di sini untuk bekal dimana kita akan membuat pusdiklat," kata Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso usai pertemuan dengan Kepala Balai Diklat BPK Satrio Haryo Nugroho dan meninjau sarana prasarana balai diklat tersebut di Medan, Sumatera Utara.

Menurut Agung, tujuan studi banding ini untuk melihat dan merancang Pusdiklat DPR yang disesuaikan dengan kepentingan DPR. Ia menegaskan, bahwa pembangunan Pusdiklat DPR ini adalah untuk penguatan kelembagaan, baik dewan maupun kesetjengan DPR sebagai *supporting system* dewan.

Ketika ditanya pendapatnya bagaimana jika mendapat sorotan dari masyarakat karena setiap DPR akan membangun gedung selalu mendapat sorotan, dengan tegas, politisi Demokrat ini menyatakan bahwa ini untuk penguatan kelembagaan dan bukan untuk kepentingan pribadi anggota dewan.

"Ini sebuah tantangan menurut saya. Untuk penguatan kelembagaan kita akan terus. Ini bukan untuk kepentingan pribadi para Anggota Dewan, tapi untuk kepentingan kelembagaan yang tentunya harus diperkuat dengan tenaga pendukung yang akan membantu anggota dewan dalam menjalankan tugasnya," pungkasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa setelah pusdiklat ini terbentuk semua tenaga *supporting system* akan diikutsertakan dalam diklat tidak terkecuali staf pribadi dan tenaga ahli dewan. "Kita akan lihat aturannya, siapa yang membuat aturan. Kami tidak akan membedakan apakah itu tenaga honorer ataupun kontrak. Kalau aturannya tidak membolehkan, kami akan minta untuk diubah. Semua *supporting system*, semua tenaga pendukung bisa dididik di Pusdiklat DPR," jelas legislator dari dapil Jabar ini.

Sebagaimana hasil pertemuan dengan Kepala Balai Diklat BPK, yang menjadi peserta diklat di Balai Diklat BPK ini termasuk tenaga kontrak dan tenaga honorer. Sementara, peraturan yang ada di Kesetjengan DPR hanya sebatas untuk PNS, sedangkan pelatihan untuk tenaga kontrak baru bersifat *workshop* saja. ■

(sc.mp) Foto: Jekah/r

Rencana Pengembangan Pusdiklat DPR RI, BURT Studi Banding ke Bapelkes Batam

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI melakukan studi banding dengan meninjau Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Kementerian Kesehatan di Batam, Kepulauan Riau. Hal tersebut terkait dengan rencana BURT DPR RI untuk mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Setjen dan BK (Badan Keahlian) DPR RI.

"Kami meninjau Bapelkes Kementerian Kesehatan di Batam dengan tujuan untuk studi banding, mencari informasi dan data terkait rencana kami ingin mengembangkan Pusdiklat DPR. Karena menurut informasi yang kami ketahui Bapelkes Batam ini merupakan



Tim Kunker BURT DPR meninjau Bapelkes Kementerian Kesehatan di Batam

salah satu balai pelatihan terbaik dengan akreditasi A," ujar Wakil Ketua BURT, Agung Budi Santoso di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (7/6).

Rencana pengembangan Pusdiklat DPR RI itu sendiri, lanjut Agung, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dan SDM (sumber daya manusia) di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Oleh karena itulah rencana tersebut harus disusun secara matang dan kompresensif. Meliputi aspek penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana, jenis program kerja, serta kebutuhan anggaran untuk pemenuhan persyaratan akreditasi, dan pelaksanaan diklat itu sendiri agar profesional dan akuntabel.

"Setelah kami lihat langsung Bapelkes ini sarana dan prasarannya cukup lengkap. Tapi tidak sepenuhnya bisa diterapkan oleh DPR RI, mengingat balai ini murni di bidang kesehatan," ungkap politisi dari fraksi Partai Demokrat ini.

Meski demikian, tambah Agung, banyak yang masih tetap bisa diadopsi oleh DPR. Misalnya terkait pembentukan karakter dan moral pegawai. Termasuk di dalamnya kedisiplinan dan profesionalitas kerja. Oleh karena ke depan pihaknya masih akan belajar dan mencari informasi dari berbagai instansi dan lembaga lainnya terkait rencana tersebut.

Lebih jauh Agung yang didampingi oleh Wakil Ketua BURT, Hasrul Azwar Harahap dan beberapa anggota BURT lainnya seperti Rendy Lamajido, Ribka Tjiptaning, Refrizal, Muslim, Joko Purwanto, Agus Sulistyono, Rita Zahara dan Irma Suryani Chaniago, serta Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan DPR RI, Rahayu Setya Wardhani ini berharap rencana pengembangan pusdiklat DPR RI itu dapat segera terwujud dengan baik dan sempurna. Minimal melebihi dari yang ada di Bapelkes Kemkes Batam ini. ■

(Ayu.mp). Foto: Ayu/r

Daerah Terpencil Tidak Miliki Sarana Pendidikan Berstandar

Banyak daerah terpencil di Indonesia tidak memiliki sarana pendidikan yang sesuai dengan tuntutan Standar Pendidikan Nasional. Kenyataan ini jadi tugas besar para pemangku kebijakan di sektor pendidikan.



Wakil Ketua Komisi XI DPR, Abdul Fikri Faqih (tengah) saat memberi sambutan di LPMP Sumut

anak Indonesia banyak yang putus sekolah sebelum mereka menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, sehingga angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah cenderung tidak terjadi peningkatan,” ungkap Fikri.

Kepala Dinas Pendidikan Sumut bahkan mengungkapkan, di Nias ada sebuah SMK yang PNS-nya hanya satu, yaitu kepala sekolahnya sendiri. Sementara guru-gurunya semuanya berstatus honorer. Para kepala sekolah juga mengeluhkan dana BOS yang minim. Ini jadi temuan berharga bagi tim Panja yang berkunjung ke Sumut. Panja Evaluasi Dikdasmen memang ingin melihat dari dekat persoalan yang membelit dunia pendidikan di daerah.

Dikatakan Fikri, tujuan kunjungan Panja ke Sumut di antaranya menguasi kebijakan penyelenggaraan program dikdasmen dan mengevaluasi standar pengelolaan dikdasmen sehingga menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan. Selain itu, untuk memetakan kondisi dikdasmen sekaligus mengevaluasi peta jalan dikdasmen 5-10 tahun ke depan. ■

Demikian disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih di Medan, Sumatera Utara, Kamis (8/6). Pertemuan dengan otoritas pendidikan setempat itu digelar di Lembaga Penjamin

Mutu Pendidikan Sumut. Keluhan selama menyelenggarakan pendidikan disampaikan para kepala sekolah dan kepala dinas.

“Pelaksanaan program pendidikan dasar menengah yang tidak terintegrasi dan berkelanjutan mengakibatkan anak-

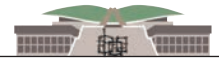
(mh,mp) Foto: husen/hr

Tim Pengendali Inflasi Daerah Malut Belum Efektif

Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI yang digelar di Grand Dafam Hotel, Ternate, Maluku Utara, Jumat (9/6). Melchias Mekeng sebagai Ketua Tim mengkritik Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Malut yang belum efektif terutama dalam menekan inflasi karena kebutuhan pokok sebagian besar dipasok dari luar daerah.



Suasana rapat Tim Kunspek Komisi XI DPR di Maluku Utara



“Saya melihat yang menjadi kendala inflasi di sini bisa melonjak tinggi karena hampir 98% bahan pokok yang ada diimport dari luar Maluku Utara. Kebutuhan pokok didatangkan dari Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Surabaya dimana hal itu akan menambah beban masyarakat” katanya.

Politisi dari Fraksi Golkar mempertanyakan bagaimana caranya agar barang-barang kebutuhan pokok bisa di produksi di sini, dengan beberapa kearifan

lokal. Jadi pemerintah daerah dengan anggaran yang ada bisa memfokuskan pengadaan bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa diproduksi di daerah sendiri.

“APBNnya sudah terkotak-kotak dari berbagai macam sektor pendidikan, kesehatan, pembayaran hutang dan lain-lain akhirnya porsi pembangunannya juga semakin sedikit dan kebutuhan pembangunan infrastruktur masih tertinggal. Kalau semuanya dikembalikan

ke pusat apa artinya otonomi daerah yang dulu kita gaungkan bahwa kalau otonomi jauh lebih enak,” ungkap Mekeng.

Menurutnya hal ini kembali kepada visi dari pemimpinnya agar jangan berharap dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Harus menggali kekayaan alam yang ada, jadikan sumber pendapatan asli daerah untuk memperkuat menjadi sebuah daerah yang maju. ■

(riel/mp), foto: arief/hr



Tim Kunspek Komisi IV DPR meninjau Pabrik Gula Tsidkmadu, Karanganyar

dua hal ini harus kita sinergikan” kata Edhy usai melakukan pertemuan yang turut dihadiri oleh Bupati Karanganyar, Dirjen Perkebunan dan Dirut PTPN IX.

Selain itu terkait permasalahan petani yang kurang bergairah dalam bertani akibat harga gula yang dipatok rendah, politisi asal F-gerindra itu menilai jangan dijadikan kambing hitam atau alasan untuk mengimpor.

“Menurut saya ini hanya masalah komunikasi, janganlah kita mencari kambing hitam kemudian kita mengimpor. Situasi kondisi pangan yang ujungnya selalu mencari kambing hitam itu hanya menjadi peluang untuk impor. Peluang dan potensi kita di negara kita tersedia tinggal bagaimana seorang

pemimpin mampu untuk mewujudkannya,” ungkapnya.

Sebelumnya direktur utama PTPN IX Budi Adi Prabowo mengadakan selama ini petani memilih tidak lagi menanam tebu karena sisi ekonominya tak lagi menjanjikan. Petani tebu merasa tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, sebagaimana diberikan kepada petani tanaman pangan. Sampai sekarang tidak ada lagi kredit untuk petani tebu, perbankan masih memandang sebelah mata.

“Begitu pula bantuan alat pertanian yang bisa mendukung peningkatan petani, juga sudah tak ada lagi. Belum lagi ketersediaan bibit yang unggul sudah tidak ada lagi. Penelitian bibit untuk tebu untuk dikembangkan menjadi bibit unggul hampir tak ada lagi,” kata dia. ■

(tra/mp) foto: itara/hr

Mesin PG Usang Sebabkan Rendemen Tebu Turun

Persoalan perkebunan tebu di pabrik gula Tasikmadu, Karanganyar, didorong DPR untuk segera diselesaikan. Mesin pabrik yang sudah usang serta kendala di on farm yang menyebabkan rendemen tebu semakin menurun adalah persoalan utama yang harus dibenahi.

Demikian dikatakan Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo saat memimpin kunjungan spesifik ke pabrik gula Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah,

Kamis (8/6/2017). “Jadi batas maksimal rendemen tebu adalah 6-7 tahun untuk dibongkar ratoon sementara di sini sudah melebihi baru dibongkar, terlebih lagi mesinnya sudah tua. Oleh karena itulah

DPR Harap Komisioner OJK Terpilih Ciptakan Market Friendly

Komisi XI DPR RI telah memilih Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022. Pemilihan tersebut dilakukan dengan sistem voting atau perhitungan suara terbanyak.

Pada putaran pertama, Wimboh Santoso terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK dengan mengantongi 50 suara mengalahkan Sigit Pramono. Disusul dengan enam nama lainnya, yakni Nurhaidah, Tirta Segara, Riswinandi, Heru Kristiyana, Hoesen dan Ahmad Hidayat sebagai anggota Dewan Komisioner.

Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng, menilai komisioner terpilih memiliki pengalaman yang mumpuni di bidangnya dan layak menduduki posisi tersebut. "Saya ucapkan selamat kepada pak Wimboh, saya rasa dengan pengalaman dia di BI dan AMF, beliau bisa lebih



Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng

berperan aktif bersama pemerintah untuk memicu pembangunan di Indonesia," ungkap Mekeng usai penetapan Komisioner OJK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis malam (08/06/2017).

Kepada dewan komisioner terpilih,

dia berharap, kedepan OJK dapat menciptakan kebijakan yang *market friendly* untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya pembangunan di pusat, tetapi juga di daerah pinggiran, khususnya kawasan timur sesuai dengan Nawacita Presiden Jokowi.

"Mereka harus bisa menarik investor ke pasar modal dan merasa nyaman di Indonesia. Tidak lagi menjadi tempat hot money, tetapi investor bisa menaruh uangnya lebih permanen di sini," jelas politisi dari F-Golkar ini.

Yang paling penting lanjut dia, harus bisa membuat market tidak membebani industri, karena sekarang masukan dari industri, pungutan yang diberikan OJK memberatkan kegiatan bisnis dan menghambat pertumbuhan industri itu sendiri.

Hal senada disampaikan anggota Komisi XI Hendrawan Supratikno, dengan berharap komisioner terpilih harus mampu menciptakan iklim yang sehat dan industri yang berdaya saing tinggi sehingga industri keuangan di Indonesia bisa bersaing di era globalisasi.

"Kesembilan komisioner ini (7 terpilih ditambah 2 dewan Komisioner OJK Ex-Officio dari Kemenkeu dan BI), harus kompak membentuk satu super team bukan superman atau superwoman, sehingga mampu menciptakan industri jasa keuangan yang efisien dan sehat," papar Hendrawan. ■

(ann.mp), Foto: Andri/fh

Panitia Angket KPK Akan Bekerja Transparan dan Akuntabel



Ketua Panitia Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa dalam diskusi publik yang bertajuk "Menyingkap Kinerja KPK Sebuah Ikhtiar Penegakan Hukum"

Hak angket merupakan hak DPR untuk mengadakan penyelidikan mengenai masalah tertentu, fungsi ini diatur dalam konstitusi. Ketua Panitia Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa menjelaskan hal tersebut saat acara diskusi publik yang bertajuk "Menyingkap Kinerja KPK Sebuah Ikhtiar Penegakan Hukum" di Sekretariat Indonesia Law Enforcement Watch (ILEW). Dalam diskusi tersebut Agun memulai pembicaraan dengan pertanyaan "Apa sih angket".



Menurutnya masih banyak orang yang membutuhkan penjelasan tentang angket. Dia mengatakan hak angket adalah hak konstitusional dewan yang dijamin konstitusi, sebagai hak penyidikan tertinggi dalam konteks negara. Dalam kerjanya Agun menjanjikan Panitia Angket DPR akan bekerja secara transparan dan akuntabel. Bahkan dia bersedia menerima yang tidak setuju dengan Panitia Angket ini. Dia mempersilahkan datang ke DPR dan menyampaikan pendapat.

“DPR menggulirkan hak angket ini semata-mata ingin mengembalikan kembali, di mana sebenarnya posisi KPK dalam negara ini dalam sistem demokrasi kita. Metode kerjanya kita akan transparan, akan terbuka, akan mengundang semua pihak,” ungkap Agun di Sekretariat ILEW Jl. Veteran 1 No 33, Jakarta, Senin (12/6/2017) sore.

Politisi Partai Golkar ini menguraikan diantara tiga cabang kekuasaan negara, yang sering disebut dengan trias politica, eksekutif, legislatif dan yudikatif, posisi KPK belum jelas, di lapangan KPK mengeksekusi dengan operasi tangkap tangan (OTT) tapi di persidangan juga menjalankan fungsi yudikatif. Terlebih lagi Agun mengatakan tidak ada lembaga yang mengawasi KPK secara tegas.

“Kita juga akan bedah melalui angket ini bagaimana posisi dan fungsi KPK dalam *criminal justice system*. Karena hukum pidana kita menganut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum formil yang mengatur proses,” tandas Agun.

Di sisi lain Direktur Eksekutif ILEW Iwan Sumule menyampaikan, tindakan OTT yang kerap kali dipertontonkan KPK menurut penilaiannya telah melanggar UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Karena pemberian suap yang kerap kali tertangkap OTT oleh KPK, tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, jika penerima suap melaporkan kepada KPK. Tapi jika dalam 30 hari suap yang diterima tidak dilaporkan kepada KPK, baru kemudian penerima suap dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana korupsi.

Pembicara lain dalam diskusi ini antara lain, Mantan Ketua Panitia Pembuat UU Tindak Pidana Korupsi Romli Atmasasmita, Praktisi Hukum dan Advocad Maqdir Ismail. Dalam diskusi ini semua bersepakat bahwa saat ini KPK perlu perbaikan, maka dari itu para pembicara berharap kepada masyarakat agar dapat memahami proses perbaikan ini, dan menghilangkan curiga dan prasangka buruk. ■

(feko/se) : Foto: Oj/ahr

Mahkamah Kehormatan DPR Sosialisasikan UU MD3



Tim Kunker Mahkamah Kehormatan DPR RI (MKD) foto bersama dengan Kapolda beserta jajarannya

Mahkamah Kehormatan DPR RI (MKD) melakukan kunjungan kerja ke Mapolda Bengkulu dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya yaitu menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Demikian diungkapkan Ketua Tim Kunker MKD DPR RI, Yulian Gunhar (F-PDI Perjuangan) kepada “Parle” usai pertemuan dengan Kapolda beserta jajaran, di Mapolda Bengkulu, Kamis (08/06/2017).

“Perubahan peraturan perundang-undangan telah memberikan porsi yang besar bagi MKD DPR dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui sistem penegakan Kode Etik DPR, baik dengan sistem pencegahan maupun sistem penindakan,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata Yulian, MKD memiliki kewajiban untuk meneruskan informasi terkait perubahan mendasar mengenai MKD dalam penegakan Kode Etik DPR kepada Kepolisian Daerah Bengkulu.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, sosialisasi UU MD3 ini sudah menjadi agenda rutin dari MKD DPR. Tentu, lanjutnya, dengan tujuan bagaimana mensosialisasikan UU MD3 ini kepada para penegak hukum yang ada di daerah-daerah berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi anggota DPR RI yang mana akhir-akhir ini terjadi penurunan kepercayaan pada lembaga negara tersebut. “Untuk itu kita berupaya melakukan sosialisasi UU MD3 ini,” ungkapnya.

la berharap, dengan adanya sosialisasi ini terbangun komunikasi yang harmonis satu sama lain. Bukan hanya kepada kepolisian saja, kata politisi asal dapil Sumsel II ini, tetapi juga kepada Kejaksaan yang berkaitan dengan penegakan supremasi hukum dan menjaga marwah kehormatan keanggotaan dewan.

Di tempat yang sama, Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Coki Manurung mengucapkan terima kasih kepada Tim MKD DPR RI yang telah berkunjung ke Provinsi Bengkulu, sekaligus mensosialisasikan perubahan UU MD3 di Mapolda Bengkulu.

“Dengan adanya sosialisasi UU MD3 ini kita dapat memperkaya yang telah diberikan. Intinya bahwa tindakan-tindakan Kepolisian harus betul-betul bersinerginitas dan berkoordinasi dengan aturan-aturan yang dibuat di dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kode Etik Anggota DPR RI sehingga tidak bisa menabrak aturan seenaknya, karena ada aturan-aturan hukumnya,” ungkap Kapolda Bengkulu.

Kapolda Coki Manurung berharap MKD sendiri perlu sharing dan berkoordinasi apabila ditemukan, diduga akan terjadi tindak pidana atau pun yang sudah terjadi tindak pidana. “Jangan lagi kita saling mendzolimi nantinya, harus saling transparan,” katanya menambahkan. ■

(w.rnp) : Foto: Iwan/hr

Sinergitas Antar Lembaga Diharapkan Untuk Cegah Inflasi

Komisi XI DPR RI memberikan apresiasi terhadap sinergitas yang baik antara Bank Indonesia Perwakilan NTB, Badan Pusat Statistik NTB serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) NTB dalam mengantisipasi inflasi yang hampir terjadi setiap tahun saat menjelang Idul Fitri. Hal itu diungkapkan Ketua Tim Kunspek Komisi XI ke NTB, Soepriyatno kepada Parlementaria, Jumat, (09/06/2017).



Suasana pertemuan Tim Komisi XI DPR dengan BI, BPS, TPID di NTB

“Kita ingin melihat langsung koordinasi dan sinergitas antara BI NTB, BPS NTB dan TPID NTB untuk bagaimana menangani inflasi daerah termasuk peredaran rupiah di daerah karena jangan sampai ini menjadi persoalan. Kita cukup bahagia karena koordinasinya mantap dan mampu menjaga inflasi di tingkat yang baik, sehingga masyarakat tidak dirugikan,” ujar Soepriyatno.

Politisi Gerindra ini pun berharap sinergitas yang baik ini dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya. Mengingat, menurutnya antisipasi inflasi di NTB selalu menjadi lebih baik di setiap tahunnya. “Kami melihat ini kinerja dari BI, BPS dan TPID sangat baik sekali. Ini bisa dijadikan contoh bagi daerah lainnya, Tahun lalu sudah baik ya, dan sekarang saya kira juga lebih baik. Di NTB ini, inflasinya cukup terjaga dengan baik. Ini penting,” tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI Wilgo Zainar juga berharap selain mampu menjaga inflasi, BI diharapkan juga mampu menjaga

Kerjasama yang baik antara BI, TPID dan BPS juga mendapatkan apresiasi dari Anggota Komisi XI Wilgo sehingga sinergitas yang baik ini harus tetap dilanjutkan. “Saya kira cukup bagus BI, TPID dan BPS bekerja baik. Dan adanya Satgas Pangan ini memperkuat lagi sehingga kerja lebih terintegrasi dan inflasi terkendalikan, meskipun kita juga tak mau ada deflasi,”

ketersediaan uang kartal selama Idul Fitri, mengingat kebutuhan tersebut sangat besar di setiap tahunnya.

“Inflasi di NTB terkendali ya. Kita berharap ketersediaan uang kertas juga agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, karena menjelang lebaran kebutuhan uang kartal ini meningkat dan alhamdulillah BI sudah menyiapkan,” ujar Willgo.

Kerjasama yang baik antara BI, TPID dan BPS juga mendapatkan apresiasi dari Anggota Komisi XI Wilgo sehingga sinergitas yang baik ini harus tetap dilanjutkan. “Saya kira cukup bagus BI, TPID dan BPS bekerja baik. Dan adanya Satgas Pangan ini memperkuat lagi sehingga kerja lebih terintegrasi dan inflasi terkendalikan, meskipun kita juga tak mau ada deflasi,” tegasnya.

Selain itu Willgo juga berharap agar produksi yang dihasilkan di NTB untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan di daerah lain. Hal ini penting agar sinergitas antar daerah dalam menghadapi Idul Fitri dapat berjalan efektif.

“Kita harapkan beberapa produk dari NTB bisa membantu memenuhi kebutuhan di daerah lainnya. Sehingga membutuhkan database yang terintegrasi, dan kebutuhan di NTB bisa *disupply* dari daerah lainnya dalam waktu cepat,” jelas Willgo.

Dalam kesempatan tersebut juga, Kepala Regional III Bank Indonesia, Mirmansyah menjelaskan bahwa rata-rata inflasi selama Ramadhan cenderung lebih tinggi ketimbang setiap bulannya. Menurutnya, inflasi di wilayah timur seperti NTB masih lebih rendah ketimbang inflasi di daerah barat, khususnya Sumatera.

“Rata-rata inflasi Ramadhan maupun lebaran cenderung lebih tinggi dibandingkan rata-rata setiap bulannya. Berdasarkan wilayah, inflasi Sumatera tercatat lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya,” tutup Mirmansyah. ■



Foto bersama Pimpinan DPR RI dengan sembilan Anggota KPAI periode 2017 - 2022

Penetapan Anggota KPAI Kedepankan Prinsip Meritokrasi

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua Fadli Zon didampingi Taufik Kurniawan dan Fahri Hamzah menyetujui secara aklamasi 9 (sembilan) komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2017-2022 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (08/6/2017).

Persetujuan diberikan setelah Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher menyampaikan laporan mengenai proses uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPAI periode 2017-2022 yang dilakukan sejak 25-31 Maret berupa verifikasi administrasi, pemaparan visi-misi serta pendalaman oleh anggota Komisi VIII DPR pada 5-7 Juni sekaligus pemilihan dan penetapan

9 komisioner dari 18 calon yang diajukan pansel.

Menurut Ali Taher, Komisi VIII melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPAI dengan mengedepankan prinsip meritokrasi. "Komisi VIII menyeleksi calon yang memiliki kompetensi, integritas serta komitmen yang kuat bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam melakukan pengawasan

penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak di Indonesia," tegas politisi Fraksi PAN ini.

Kesembilan komisioner KPAI periode 2017-2022 itu adalah Ali Maryati Solihah dari unsur pemerintah, Jasra (masyarakat peduli anak), Margaret Aliyatul Maimunah (ormas), Putu Elvina (masyarakat peduli anak), Retno Listyarti (pemerintah), Rita Pranawati (ormas), Sitti Hikmawatty (dunia usaha) Susanto (tokoh agama) dan Susianah (tokoh masyarakat).

Setelah disetujui DPR, kesembilan komisioner KPAI ini akan diproses Pimpinan DPR untuk disampaikan kepada Presiden. ■

(mp). Foto: Jayadhr



Dua Wakil Ketua Komisi I, Tb Hasanuddin dan Asril Hamzah Tanjung berbincang dengan Menhan, Ryamizard Ryacudu sebelum rapat, Kamis (15/6). Foto: Andri

RDP Komisi X DPR dengan Badan Ekonomi Kreatif dipimpin Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih di Ruang Rapat Komisi X DPR, Rabu (14/6). Foto: Arief



Raker Komisi IV DPR dengan Menteri LHK dipimpin Wakil Ketua Herman Khaeron terkait usulan perubahan peruntukan kawasan hutan, Rabu (14/6). Foto: Kresno